



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH SARWONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **981918**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.694.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/114 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 944.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/160 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	421.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	48.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	453.454.086
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.616.954.086



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.616.954.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.